

DUALISME KEPEMIMPINAN KEPALA SKPD KABUPATEN SARMI TAHUN 2015/2016

Reinhard Lazarus. Yogi¹⁾, Bandiyah²⁾, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: hellorinhard@gmail.com ¹⁾, dyah_3981@unud.ac.id ²⁾, mahaswari@unud.ac.id ³⁾

ABSTRACT

This research was conducted in Sarmi Regency with the problem of the head SKPD dualism in 2015/2016. The purpose of this research describe in detail the dualism leadership of the head SKPD Sarmi in 2015/2016. This research used contingency theory and qualitative methods, data collection done through observation and interviews. Based results analysis, find the process of implementing the appointment or dismissal structure in the bureaucracy in Sarmi Regency is unconstitutional and indicated political dynasties. The style of leadership in Sarmi is autocratic with the powerful political influence make bureaucracy is directive. The consequence is there is an illegal policy issued of the regeneration with the unilateral SKPD head being stated overlapping the SKPD head resulting from the appointment of the acting regent who is based on the minister of home affairs decree and the result of the appointment of the regenthead based on the strength of his position.

Keywords: *dualism, leadership, bureaucracy, political power.*

1. PENDAHULUAN

Membicarakan mengenai kepemimpinan memang menarik karena manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan seorang pemimpin. Selain itu, membicarakan mengenai kepemimpinan dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Salah satu sudut yang menarik dilihat adalah masalah kepemimpinan atau lebih spesifiknya "dualisme kepemimpinan".

. Kabupaten Sarmi sebagai salah satu Kabupaten pemekaran yang terletak di Provinsi Papua sangat dibingungkan oleh situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sarmi, yang mengalami dualisme kepemimpinan kepala SKPD di dalam birokrasi Pemerintahan yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2015.

Terdapat dua Kepala Pimpinan SKPD dalam satu jabatan, yaitu Kepala SKPD yang dilantik oleh Wakil Bupati Sarmi, Ir. Albertus Suripno, sebagai Pelaksana Tugas (Plt), dan Bupati Kabupaten Sarmi Drs. Mesak Manimbor, M.MT yang berujung pada fungsi roda Pemerintahan yang stagnan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pelaksana fungsi eksekutif yang saling berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, namun dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Sarmi telah menggambarkan bagaimana telah terjadi persinggungan dan akhirnya

menghilangkan esensi mendasar dari yang dinamakan Satuan Perangkat Daerah.

Kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan dapat dikatakan bermula dari kewenangan yang resmi (legitimate power) French dan Raven (1959) dalam Thoha (2014:160) karena pada dasarnya menurut Immanuel Kant (1981) dalam Thoha (2004:148) bahwa individu yang otonom seringkali mempunyai kebebasan dalam berkeinginan (free will). Polemik dualisme kepemimpinan yang terjadi pada birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Sarmi dimana pelaksana tugas yang sering dikaitkan dengan motif politik berbanding terbalik terhadap tindakan yang dilakukan bupati sebagai kepala Daerah yang notabene lebih mengenal kewenangan yang dimiliki justru melakukan tindakan pelanggaran hukum yang mengikat jabatannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dari keempat penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian terhadap dualisme kepemimpinan sangat jarang dilakukan sehingga peneliti hanya mengambil beberapa penelitian yang relevan dalam aspek perspektif dan aspek pendukung lainnya bagi penelitian ini, namun tidak secara spesifik terhadap dualisme kepemimpinan. *“Determinan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang”* (2010) dikaji oleh Syamsul Sunusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu daerah kabupaten dilihat dari sumber daya

aparatur daerah yang memiliki kapabilitas dan bersifat profesional. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan suatu instrumen penting yang harus dilakukan dengan mekanisme atau tahapan-tahapan pelaksanaan agar tujuan organisasi dan Daerah dapat tercapai sehingga disiplin kerja, reposisi jabatan, dapat direalisasikan secara adil dan konsisten. *“Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2010-2015 di Kabupaten Maros”* (2016) dikaji oleh Sitti Battari Puteri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usaha dalam mewujudkan hubungan yang efektif dengan anggota organisasinya. Pemimpin diharapkan berfungsi sebagai katalisator guna mempercepat dinamisme dan kerjasama demi pencapaian tujuan organisasi. *“Kepemimpinan dan Fungsi Integrasi”* (2016) dikaji oleh Sri Praptono. Hasil penelitian ini menjelaskan pemimpin sebagai pusat dari suatu birokrasi memegang peranan besar terkait fungsi integrasi karena secara formal telah mendapatkan legitimasi yang menghasilkan kewenangan dan otoritas tertentu. Posisi pemimpin dalam kepemimpinannya memungkinkan melakukan penataan-penataan dan pembinaan aparatur dari suatu birokrasi termasuk didalamnya adalah mempengaruhi sehingga setiap aparatur dan kontribusi yang diberikan berkaitan erat dengan kepemimpinan seorang pemimpin. Posisi ini membuat

kepemimpinan seorang pemimpin memegang peranan penting dalam optimalisasi dan fungsi integrasi terhadap birokrasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang Dualisme Kepemimpinan Kepala SKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2015/2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan *purposive sampling* yakni pihak – pihak yang dinilai relevan dan mempunyai kapabilitas terkait fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan temuan terkait bagaimana terjadinya dualisme kepemimpinan kepala skpd Kabupaten Sarmi Tahun 2015/2016 di antaranya :

- 1) Historis Hubungan Pimpinan di Kabupaten Sarmi.

Apa bila dilihat dari latar belakang dan aspek historis hubungan Bupati Mesak Manibor dan Wakil Bupati Suripno selama masih menjadi pejabat pemerintahan pada masa jabatan bupati sebelumnya hubungan bupati Mesak dan wakil bupati Suripno memiliki dinamika tersendiri keduanya sering berseberangan pendapat dan bahkan secara frontal sering beradu

mulut. Pencalonan mereka tidak serta merta berjalan mulus melainkan hanyalah sebuah langkah politik dan langkah ambisius masing-masing pribadi. Berangkat dari sebuah ketidakcocokan atau rasa tidak suka secara pribadi dan dominasi secara pribadi antara kedua pemimpin yang memaksa bersatu demi sebuah kekuasaan dan jabatan tanpa mengutamakan pondasi yang sebenarnya menjadi salah satu elemen terpenting dalam berdirinya sebuah pemerintahan. Dilihat dari aspek historis Wakil Bupati Suirpno merupakan orang terpecaya dan memiliki track record bagus hingga sebagian besar masyarakat kabupaten Sarmi memiliki impresi baik terhadap wakil Bupati Suripno pada masa masih menjadi pejabat dalam pemerintahan Bupati sebelumnya. Kekurangan wakil bupati Suripno adalah beliau bukan merupakan orang asli Sarmi, melainkan beliau adalah pendatang dari luar Papua Sehingga kekuatan politik Suripno tidaklah kuat. Hal ini dimanfaatkan bupati Mesak Manibor menggunakan profil Suripno untuk mendulang suara dan menjadikan bapak Suripno sebagai calon wakil bupati karena tingginya kepercayaan masyarakat kepada beliau dan memiliki suara dari masyarakat lokal maupun pendatang karena mampu mengelola dana bantuan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

- 2) Kepemimpinan, Birokrasi, dan Kekuasaan Politik.

Selama resmi menjadi Bupati Sarmi bupati Mesak melakukan langkah-langkah strategis dalam membangun struktur pemerintahannya. Pada awal tahun kedua

hubungan diantara kedua pemimpin mulai retak dengan isu dan pernyataan frontal “kudeta sipil” yang disebar oleh Bupati Mesak bahwa Wabup Suripno akan menjatuhkan posisinya sebagai Bupati Sarmi. (Werinussa, 2018). Ketidakpercayaan bupati dilanjutkan dengan tidak memberikan wewenang dan pembagian kekuasaan kepada wakil bupati Suripno sehingga wakil bupati hanya sebuah identitas tanpa fungsi dan tugas karena monopoli oleh bupati. Pada tanggal 14 Mei 2015 Bupati Sarmi dijemput paksa tim penyidik kejaksaan dan menjadi tahanan untuk proses penyidikan hingga 16 November 2015. Selama bupati berada di tahanan terjadi kekosongan pemerintahan sehingga membuat wakil bupati Suripno mengeluarkan surat edaran nomor 100/212/BUP/2015 pada tanggal 29 Juli 2015 tentang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pasca ditahannya Bupati Sarmi. Wakil Bupati Suripno menyurati Mendagri yang tertuang dalam surat bupati nomor 100/228.A/BUP/2015 perihal status hukum Bupati Sarmi. Strategi dan langkah yang diambil Wakil Bupati berbuah manis dengan keluarnya Surat penonaktifkan sementara Bupati Mesak melalui surat Gubernur Provinsi Papua nomor 180/2035/SET yang didasari dari Surat Mendagri nomor 356/2990/OTDA. Pada tanggal 11 November 2015 Wakil Bupati Suripno diangkat menjadi Plt Bupati Sarmi dengan didasarkan pada SK Mendagri Nomor 31.91-5878 tahun 2015. Hal ini merupakan momentum bagi wakil bupati menunjukkan kemampuan dan mulai

merasakan fungsinya sebagai wakil bupati yang selama ini ditekan oleh Bupati Mesak (Luwunaung, 2018). Namun kejadian dilapangan tidak seperti yang diharapkan karena sebelumnya Bupati Mesak telah menetapkan kroni-kroninya pada posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sarmi sehingga walaupun Bupati Mesak telah menjadi tersangka namun jajaran dalam pemerintahan Kabupaten Sarmi lebih loyal kepada Bupati Mesak (Werinussa, 2018).

Berdasarkan tugas sebagai pelaksana tugas sementara Plt Suripno kemudian mengangkat dan melakukan seleksi SKPD sesuai aturan UU Aparatur Sipil Negara No.5 Pasal 108 dan 110 tahun 2015. Dimana dalam proses pengangkatan terdapat seleksi kompetitif dan juga pada pemberhentian SKPD sebelumnya telah memperhatikan undang-undang aparatur sipil negara nomor 5 pasal 118 tahun 2015 langkah pengangkatan dan pelantikan kepala skpd baru merupakan langkah menetralsisir struktur yang tidak efektif guna mengembalikan fungsi integrasi dan koordinasi antara pimpinan dan organisasi. Gejala dinamika dualisme kepemimpinan kepala skpd kabupaten Sarmi dimulai ketika Bupati nonaktif diangkat melalui SK Mendagri pada tahun 2016. Setelah aktif kembali Bupati Mesak langsung melakukan pengangkatan SKPD tanpa mengikuti aturan undang-undang aparatur sipil negara. Pengangkatan kepala SKPD yang dilakukan oleh Bupati Mesak berupa penunjukkan pribadi dan tidak melalui proses seleksi dari panitia pengangkatan

sesuai undang-undang aparatur sipil negara.

Menurut undang-undang No.5 tahun 2014 pasal 116 menekankan bahwa Bupati dilarang melakukan pemberhentian kepala SKPD dalam waktu 2 tahun. Mengingat SKPD wakil bupati baru diangkat pada Desember 2015 maka pengangkatan kepala SKPD bupati tidak resmi. Hal ini didukung oleh pernyataan Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono yang dikutip dari media online bahwa kepala SKPD wakil bupati Suripno memiliki kekuatan hukum tetap hingga adanya seleksi dan SK yang resmi (Republika, 2016). Dibalik berbagai penolakan dan benturan bahkan penolakan dari Ditjen OTDA Bupati Mesak Manibor tetap kokoh dengan pendiriannya dan melakukan pengangkatan serta pelantikan kepala SKPD pada tanggal 22 Juni 2016.

Hal ini menunjukkan bagaimana politik itu bekerja. Benturan antara undang-undang pemerintah pusat dengan kekuasaan politik Bupati Mesak menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan masih terdapat tipe kepemimpinan otoriter untuk mengejar kekuasaan seluas-luasnya. Mendukung pernyataan Amrullah (1991) yang dikutip dari Imam Hidajat (2012:31) bahwa kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik itu saling berbenturan. Dalam praktek yang terjadi kekuasaan politik dengan pengaruh (influence) yang dimiliki lebih mendominasi kekuatan dan kekuasaan pemerintahan hingga pada teknis kekuasaan.

3) Hasil Akhir Berdasarkan Teori Kepemimpinan Kontingensi.

Sesuai dengan teori kontingensi yaitu apabila ingin melihat kesesuaian salah satu diantara pemimpin atau organisasi (kelompok) dengan menganalisis variabel yang menciptakan iklim yang berdiri sebagai pengaruh maka hasil teori dikatakan relevan karena dari hasil analisis ke lapangan dalam melihat iklim di masing-masing variabel sebagai pembentuk untuk menentukan jawaban apa yang akan didapat maka jawabannya adalah Dualisme Kepemimpinan Kepala SKPD Kabupaten Sarmi terjadi karena perilaku kepemimpinan dari pemimpin daerah Sarmi yaitu Bupati Mesak beserta variabel-variabel situasional yang tidak berorientasi pada pekerjaan melainkan kepada kekuasaan politik yang menjadikan situasi menjadi tidak kondusif dan stagnan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi Dualisme Kepemimpinan Kepala SKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2015/2016 adalah yang pertama Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi bersifat otoriter sehingga pengambilan keputusan menjadi direktif. Kedua, proses pelantikan dan pemberhentian aparatur tidak mengikuti aturan undang-undang dan proses seleksi. Ketiga, Penempatan jabatan yang tidak transparan/tertutup dan mendadak serta kuatnya kekuasaan politik identitas dan pengaruh non teknis seperti pengaruh

pimpinan daerah terhadap karir aparatur membuat pengangkatan dan pemberhentian aparatur menjadi bersifat inkonstitusional.

Penempatan jabatan yang tidak transparan/tertutup dan mendadak serta kuatnya kekuasaan politik identitas dan pengaruh non teknis seperti pengaruh pimpinan daerah terhadap karir aparatur membuat pengangkatan dan pemberhentian aparatur menjadi bersifat inkonstitusional sehingga menciptakan terjadinya Dualisme Kepemimpinan Kepala SKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2015/2016.

6. DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hidajat, Imam. (2012). Teori-Teori Politik Cetakan Ketiga. Malang: Setara Press.

Harrison, Lisa. (2009). Metodologi Penelitian Politik Edisi Pertama

Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.

Holidin, Defny. (2016). Reformasi Birokrasi Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.

Ibrahim, Amin. (2013). Dinamika Politik Lokal Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.

Sugiono. (2007). Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sumber Skripsi, Tesis dan Jurnal

Aloysius, Brata. 2008. "Pemekaran di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs Kepentingan Elit". (Jurnal). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses dari <http://econpapers.repec.org/paper/p/ramprapa/13277.htm> 11 Desember, pukul 16.28 WITA.

Muhammad, Fadli. 2010. "Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Pembangunan Kesehatan di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)". (Tesis) Program Studi Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41041> 11 Oktober, pukul 18:28 WITA.

Sitti, Batari Putri. 2016. "Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2010-

2015 di Kabupaten Maros". (Skripsi)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Hasanuddin Makassar.
Diakses dari
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/17750> 9 Desember,
pukul 16. 36 WITA.

Praptono, Sri. 2016. "Kepemimpinan dan Fungsi Integrasi". (Jurnal) Program studi Administrasi Universitas Pandanaran Semarang. Diakses dari
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/NSPI/article/view/379/0> 16 Desember, pukul 2.23 WITA.

Sumber dari Web

<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/15/kemendagri-pastikan-pemerintahan-di-kabupaten-sarmi-berjalan-kondusif> diakses pada tanggal 10 Oktober, pukul 17.20 WITA.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/16/o8tycu365-kemendagri-pemerintahan-kabupaten-sarmi-bakal-berjalan-kondusif> diakses pada tanggal 11 Oktober, pukul 1:19 WITA

<http://www.indikasinews.com/2016/01/QO9PytUR.dpufhtml#sthash/tangapan-dewan-adat-sarmi-papua-tentang-konflik-dualsme> diakses pada tanggal 11 Oktober, pukul 00:41 WITA.